

Aspek-aspek Politik Hubungan ASEAN-Korea Selatan

A.R. SUTOPO

Kecuali Muangthai, semua negara ASEAN dan Korea Selatan baru tampil dalam gelanggang internasional setelah berakhirnya Perang Dunia II. Meskipun demikian, barulah sejak dasawarsa 1970-an ASEAN mampu mengembangkan dirinya menjadi salah satu unsur penting dalam politik internasional di kawasan Asia Tenggara yang hingga tingkat tertentu diperhitungkan sebagai satu kelompok. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan saat dibentuknya ASEAN, Korea Selatan tampaknya juga sedang berada dalam proses melaksanakan suatu politik luar negeri yang lebih aktif setelah beberapa waktu sebelumnya lebih banyak menyandarkan diri pada Amerika Serikat.¹ Tambahan lagi, sekurang-kurangnya sejak pertengahan dasawarsa 1960-an situasi politik, ekonomi dan keamanan yang sedang berlangsung di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur tampak berkembang menuju ke arah makin terkaitnya satu sama lain.² Mengingat kedudukan ASEAN dan Korea Selatan secara geografis sebenarnya tidak terlalu jauh terpisahkan satu sama lain, maka kiranya tidak terlalu mengada-ada untuk membicarakan hubungan-hubungan politik antara ASEAN dan Korea Selatan.

Walaupun demikian, haruslah disadari sejak awal bahwa hubungan-hubungan politik antara ASEAN dan Korea Selatan belum berkembang sede-

Tulisan ini dikembangkan dari makalah berjudul "The ASEAN South Korea Relations: Political Aspects" yang disajikan dalam *The ASEAN-South Korea Forum*, diorganisir oleh Singapore Institute of International Affairs, Singapura 25-28 Oktober 1987.

¹Lihat, misalnya, Sang-Seek Park, "Determinants of Korean Foreign Policy: A Review of the 38-Year History," *Korea & World Affairs*, 10/3 (Fall 1986): hal. 457-483; dan Joon-Young Park, "Korea's Return to Asia: An Analysis of New Moves in South Korean Diplomacy in the 1960s and 1970s," *Korea Observer*, XII/3 (Autumn 1981): hal. 281-303.

mikian rupa sehingga memungkinkan orang secara pasti dan leluasa berbicara tentang bidang ini. Bahkan dalam kenyataannya hingga kini belum terdapat banyak hal yang dapat dibicarakan dalam hubungan politik antara ASEAN dan Korea Selatan. Sebagai suatu wadah kerjasama ASEAN memang telah menjadikan kerjasama politik sebagai salah satu bidang yang hendak diupayakan. Deklarasi *ASEAN Concord* memang secara eksplisit menyebutkan serangkaian program aksi yang akan dilaksanakannya, termasuk dalam bidang-bidang kerjasama politik. Tetapi tidak terdapat satu hal pun yang dinyatakan oleh ASEAN berkenaan dengan bagaimana hubungan politik dengan negara-negara lain atau kelompok negara-negara lain akan dilaksanakan atau dikembangkannya.

Dari sebab itu, tampaknya hubungan politik antara ASEAN dan Korea Selatan akan lebih dapat dipahami terutama dalam konteks hubungan bilateral antara masing-masing negara anggota ASEAN di satu pihak dan Korea Selatan di lain pihak. Pemahaman atas hubungan-hubungan politik secara bilateral ini kiranya akan bermanfaat bagi upaya mengidentifikasi hakikat, atau pola-pola, dari hubungan politik ASEAN dengan Korea Selatan. Untuk itu, tulisan ini pertama-tama akan sedikit membahas pola-pola hubungan antara negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara besar, khususnya dalam konteks hubungan Timur-Barat, dan bagaimana hubungan-hubungan ini berpengaruh atas orientasi politik luar negeri mereka masing-masing dan akibat-akibatnya bagi hubungan mereka dengan Korea Selatan. Kedua, tulisan ini akan menelusuri hubungan negara-negara ASEAN dengan Korea Selatan, khususnya sejak setelah terbentuknya ASEAN. Dan akhirnya tulisan ini akan ditutup dengan suatu penilaian atas kemungkinan arah hubungan politik tersebut di masa depan.

PENGALAMAN MASA LALU

Salah satu kenyataan yang paling menonjol setelah berakhirnya Perang Dunia II adalah bahwa suasana Perang Dingin yang berkembang dalam hubungan Timur-Barat juga bertiup ke arah kawasan Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, beberapa negara Barat secara aktif mengupayakan terlaksananya politik pembendungan (*containment*) terhadap apa yang dipandang sebagai ancaman ekspansionisme komunis di seluruh penjuru dunia. Di Asia Tenggara, seperti halnya juga di Asia Timur, Amerika Serikat pada khususnya sangat aktif dalam usahanya mendapatkan sekutu-sekutu politik dan militer. Usaha itu antara lain terwujud khususnya dalam bentuk dicapainya serangkaian persetujuan bilateral dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan Amerika Serikat dengan Filipina dan Muangthai,

anggota ASEAN menjadi sekutu terpercaya dari negara-negara Barat dan yang lainnya masih berada di bawah naungan Inggris (yaitu, Malaysia dan Singapura) dan karena itu juga sangat dekat dengan Barat, sejak semula Indonesia telah memilih untuk tidak melibatkan diri ke dalam konflik Timur-Barat.

Sementara itu, meskipun menjelang dasawarsa 1950-an sebagian besar negara ASEAN telah mencapai kemerdekaan politiknya, hubungan-hubungan sosial, kebudayaan dan khususnya ekonomi mereka masing-masing dilakukan terutama dengan negara-negara Barat, khususnya dengan bekas penjajahnya, yang telah terjalin sejak masa penjajahan. Bagi sebagian besar negara-negara anggota ASEAN hubungan-hubungan tersebut hingga tingkat tertentu telah dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan mereka dalam berbagai bidang itu. Dilihat dari segi demikian itu, negara-negara ASEAN ketika itu umumnya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan dunia Barat daripada dengan pihak-pihak lainnya. Di lain pihak, harus pula diakui bahwa pada saat itu hubungan-hubungan di antara negara-negara Asia Tenggara sendiri, khususnya yang ketika itu telah mencapai kemerdekaannya, belumlah terselenggara secara intensif meskipun kontak-kontak, khususnya melalui forum-forum multilateral seperti Konperensi Asia-Afrika dan lembaga-lembaga khusus yang dibentuk PBB serta organisasi-organisasi regional tertentu, telah dilakukan.

Negara-negara ASEAN memang tidak pernah melihat Korea Selatan sebagai sumber ancaman militer. Tetapi mereka juga tidak memperhitungkan Korea Selatan sebagai salah satu mitra yang pantas dipertimbangkan dalam upaya membangun negaranya masing-masing mengingat kenyataan bahwa Korea Selatan masih sama agraris dan terbelakangnya dengan mereka sendiri. Sebagai gambaran, pendapatan per kapita penduduk Korea Selatan pada tahun 1960 adalah US\$81 dan lima tahun kemudian (1965) baru meningkat menjadi US\$106.³ Di lain pihak, perhatian Korea Selatan sendiri masih terpusatkan pada masalah keamanan nasionalnya yang terancam oleh kekuatan militer Korea Utara yang mendapatkan dukungan dari RRC dan Uni Soviet. Dari sebab itu perhatian Korea Selatan pada Asia Tenggara sangat kurang.

Faktor-faktor tersebut tampaknya dapat menjelaskan mengapa keadaan hubungan antara masing-masing negara ASEAN di satu pihak dan Korea Selatan di lain pihak dalam dasawarsa 1950-an sangat terbatas. Hanya beberapa negara yang pro-Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara saja yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Karena itu dapat dikatakan bahwa dukungan Amerika Serikat secara politik dan militer kepada Korea Selatan sejak negeri ini memproklamkan berdirinya pada tahun 1948 juga diikuti oleh sekutu-sekutunya di Asia Tenggara, yaitu Filipina dan Mianmar. Sikap mereka ini pada dasarnya juga menunjukkan bahwa

Amerika Serikat terhadap Semenanjung Korea. Salah satu alasan utama mereka memilih kebijakan demikian itu tampaknya adalah bahwa mereka cukup merasakan dan menikmati perlindungan keamanan yang besar dari kehadiran militer Amerika Serikat melalui pengaturan-pengaturan bilateral maupun multilateral.

Di lain pihak, tidak satu pun negara-negara yang baru merdeka yang orientasi politik luar negeri non-blok menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Bahkan dalam dasawarsa 1950-an negara-negara seperti Indonesia tidak menganggap Korea Selatan sebagai pemerintah yang sah dan menganggap baik Korea Selatan maupun Korea Utara sebagai pion-pion dalam permainan catur antar-negara adikuasa.⁴ Posisi dua Korea yang secara langsung terlibat dalam konflik Timur-Barat ini juga tercermin dari tidak diundangnya kedua negara tersebut dalam Konperensi Asia-Afrika.

Pada permulaan dasawarsa 1960-an hubungan-hubungan antar-negara di Asia Tenggara mulai memasuki suatu tahapan baru. Di satu pihak, terdapat beberapa petunjuk yang menonjol tentang kepentingan untuk melakukan kerjasama di antara negara-negara dalam kawasan ini dalam menghadapi masalah-masalah mereka bersama. Misalnya, Malay(sia), Filipina dan Muangthai berusaha mengembangkan kerjasama regional melalui pembentukan ASA (*Association of Southeast Asia*) pada tahun 1961. Di lain pihak, konflik-konflik antar-negara juga mulai muncul dan berkembang di antara negara-negara bertetangga di kawasan Asia Tenggara. Pada waktu itu, misalnya, Indonesia secara aktif menentang pelaksanaan pembentukan Federasi Malaysia dan kemudian melancarkan politik konfrontasi. Berkaitan dengan pembentukan Federasi Malaysia itu pula, Filipina juga berselisih dengan Malaysia mengenai status Sabah yang pada gilirannya, melumpuhkan kegiatan-kegiatan ASA. Menjelang pertengahan dasawarsa 1960-an itu konflik-konflik yang terjadi tidak saja di antara negara-negara ini tetapi juga di antara negara-negara Asia Tenggara lainnya meningkat.

Sementara itu, perkembangan-perkembangan yang terjadi di daratan Asia Tenggara juga ditandai oleh meningkatnya keterlibatan Amerika Serikat di Vietnam yang lambat-laun membawanya ke dalam suatu perang yang tidak diumumkan di Indocina. Ketika Amerika Serikat mulai terjerat dalam Perang Vietnam itu, pada tahun 1964 Korea Selatan memutuskan untuk turut serta mengirimkan pasukannya membantu Amerika Serikat dalam mendukung pemerintahan yang berkuasa di Vietnam Selatan. Tetapi partisipasi Korea Selatan dalam Perang Vietnam itu terutama bukan karena alasan bahwa ia adalah sekutu Vietnam Selatan, tetapi karena ia adalah sekutu Amerika Serikat yang berusaha mencegah menurunnya komitmen pertahanan Amerika Serikat pada keamanan Korea Selatan di tengah meningkatnya keterlibatan

Amerika dalam konflik di Indocina.⁵ Jadi keterlibatan Korea Selatan di Vietnam bukan dilandasi oleh pentingnya hubungan negeri itu dengan kawasan Asia Tenggara tetapi oleh karena kepentingan hubungannya dengan Amerika Serikat.

Hingga tahap ini Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang kemudian menjadi sangat militan anti-Barat. Tidak saja ia memusuhi Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya tetapi juga mulai mengembangkan pola hubungan yang makin dekat dengan negara-negara sosialis, khususnya dengan Uni Soviet (kemudian RRC), Vietnam Utara dan Korea Utara. Dalam bulan Agustus 1964 Indonesia mengakui Korea Utara sebagai pemerintahan yang sah atas Korea, suatu kebijakan yang samasekali bertentangan dengan kebijakan negara-negara ASEAN lainnya yang hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan. Dalam periode inilah kemudian dikenal adanya istilah Poros Jakarta-Hanoi-Beijing-Pyongyang.

Dari sebab itu, hingga menjelang terbentuknya ASEAN dalam bulan Agustus 1967 yang membawa Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Muangthai ke dalam suatu kerjasama regional baru di Asia Tenggara, tiga negara telah menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Selatan, dan tidak satu pun di antara negara-negara ASEAN kecuali Indonesia yang menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Hingga taraf tertentu, hubungan mereka masing-masing dengan Korea Selatan mencerminkan orientasi-orientasi politik luar negeri yang berbeda satu dengan lainnya berkenaan dengan konflik Timur-Barat.

Di antara negara-negara ASEAN, Filipina dan Muangthai merupakan pihak-pihak yang pertama kali mengakui Korea Selatan tidak lama setelah lahirnya Korea Selatan tahun 1948. Mereka tidak hanya mengakui republik yang baru lahir itu saja tetapi juga berpartisipasi dalam Perang Korea pada awal dasawarsa 1950-an dengan mengirim pasukan ke Korea sebagai bagian dari pasukan keamanan PBB. Filipina juga merupakan negara Asia Tenggara pertama yang mempunyai hubungan diplomatik penuh dengan Seoul, yaitu sejak bulan Maret 1949. Ini kemudian disusul oleh Muangthai dalam bulan Oktober 1958 dan oleh Malaya bulan Februari 1960. Di lain pihak, Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara pada bulan April 1964 dan dengan Korea Selatan baru dalam bulan September 1973, dan kemudian diikuti oleh Singapura bulan Agustus 1975.⁶

⁵Lihat, misalnya, Sung-joo Han, "South Korea's Policy Objectives in Southeast Asia," dalam *Southeast Asia in Transition: Regional and International Politics*, diedit oleh Jae Kyu Park dan Melvin Gurtov (Seoul: The Institute for Far Eastern Studies, Kyung Nam University, 1977), hal. 213-229.

⁶Tentang rincian pengakuan dan hubungan diplomatik negara-negara ASEAN dengan Korea Selatan, lihat misalnya Byung Chul Koh, "Southeast Asia in Pyongyang's Foreign Policy," dalam

Hingga menjelang akhir dasawarsa 1960-an negara-negara ASEAN merianggapp bahwa peranan Korea Selatan sangat kecil dalam pembangunan ekonomi regional di Asia Tenggara. Demikian juga halnya di bidang-bidang politik dan keamanan meskipun Korea Selatan mengirimkan pasukannya ke Vietnam dan memprakarsai pembentukan Forum ASPAC (*Asia and Pacific Council*). Bagi negara-negara ASEAN tampaknya kebijakan Korea Selatan terhadap Asia Tenggara pada khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya hanyalah mencerminkan posisinya sebagai sekutu Amerika Serikat belaka. Dengan perkataan lain, mulai terlibatnya Korea Selatan secara aktif di Asia Tenggara dipandang terutama sebagai upayanya untuk terus mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan para sekutu maupun teman-teman Amerika Serikat di Asia Tenggara dalam konflik dan persaingannya dengan musuh utamanya yaitu Korea Utara. Dalam hubungan ekonomi, hingga saat itu Korea Selatan juga tidak menduduki tempat penting di masing-masing negara anggota ASEAN, baik dalam bentuk perdagangan, sebagai sumber investasi ataupun alih-teknologi.

HUBUNGAN ASEAN-KOREA SELATAN DEWASA INI

Dalam perkembangannya ternyata pembentukan ASEAN pada tahun 1967 kemudian mampu mengubah hakikat dan sifat hubungan di antara para anggotanya ke arah yang jauh lebih bersahabat. Salah satu faktor paling penting di balik ini adalah terjadinya perubahan pemerintahan di Indonesia dari era Soekarno ke era Soeharto. Perubahan pemerintahan ini juga mengakibatkan terjadinya transformasi tingkah-laku politik luar negeri Indonesia dari yang bersifat radikal dan revolusioner kepada suatu politik luar negeri yang bersifat moderat dan berpenampilan *low profile*.⁷ Ternyata perubahan ini juga berpengaruh pada hubungan Indonesia dengan Korea Selatan. Pada tahun 1968, berbeda dari kebijakannya terdahulu yang hanya mengakui Korea Utara, Indonesia menegaskan pengakuannya atas dua Korea dengan membuka konsulat di Seoul, dan kemudian diikuti dengan pembukaan hubungan diplomatik pada tahun 1973. Tetapi hal ini tampaknya juga karena pada waktu itu Korea Selatan telah mulai melaksanakan diplomasi yang aktif sekali terhadap negara-negara ASEAN pada umumnya.⁸

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pembentukan ASEAN terjadi dalam suatu lingkungan internasional yang dapat berpengaruh atas persepsi masing-masing negara anggota ASEAN pada umumnya terhadap negara-negara komunis. Pada tahun 1967 pemerintahan Partai Buruh di Inggris

⁷Ikuti J. Soedjati Djiwandono, "Indonesia's Relations with Other Southeast Asian Coun-

memutuskan untuk menarik seluruh kekuatan militernya dari sebelah timur Suez yang akan terselesaikan pada akhir tahun 1971. Pada waktu yang kurang-lebih bersamaan, untuk pertama kalinya kekuatan Angkatan Laut Uni Soviet menunjukkan kehadirannya di kawasan Samudera Hindia, suatu pertanda mengenai meningkatnya kekuatan Uni Soviet di sekitar kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Amerika Serikat, yang kala itu masih terlibat dalam Perang Vietnam, merumuskan suatu garis besar kebijakan politik luar negerinya yang dikenal sebagai Doktrin Guam/Doktrin Nixon pada tahun 1969. Pada dasarnya doktrin ini menyatakan bahwa di masa depan Amerika Serikat tidak akan lagi melibatkan diri dalam suatu perang dengan mengirim pasukannya di medan Asia, tetapi akan lebih memusatkan bantuannya kepada negara-negara sekutu dan sahabatnya di Asia yang menghadapi ancaman itu melalui bantuan ekonomi dan perangkat militer. Di kalangan dunia sosialis-komunis perpecahan antara RRC dan Uni Soviet mencapai puncaknya dalam bentuk konflik bersenjata di sepanjang perbatasan bersama kedua negara pada tahun 1969. Situasi internasional itu menjadi makin kompleks ketika Amerika Serikat mengambil inisiatif untuk melakukan pendekatan-pendekatan pada RRC sejak tahun 1971.

Lingkungan internasional yang demikian itu tentu membawa dampak pada hubungan negara-negara ASEAN dengan negara-negara tetangganya yang komunis. Dalam situasi lingkungan internasional yang sedang berubah itulah negara-negara ASEAN kemudian mengeluarkan suatu deklarasi untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai zona damai, bebas dan netralitas, yang kemudian lebih dikenal sebagai ZOPFAN, pada tahun 1971. Tetapi juga tidak kalah pentingnya untuk dicatat adalah bahwa hampir semua negara anggota ASEAN juga mengembangkan suatu bentuk hubungan baru dengan negara-negara sosialis-komunis, teristimewa dengan RRC dan Korea Utara. Berkenaan dengan hubungan dengan Korea Utara, Malaysia menjalin hubungan diplomatiknya dengan Pyongyang pada bulan Juni 1973, Muangthai melakukannya pada bulan Mei 1975, yang kemudian diikuti oleh Singapura dalam bulan November tahun yang sama. Hingga kini tinggal Brunei dan Filipina saja di antara negara-negara anggota ASEAN yang belum menjalin hubungan diplomatik dengan Pyongyang. Dari sebab itu, ditinjau dari sudut pandang politik dapatlah dikatakan bahwa hampir semua negara anggota ASEAN dewasa ini telah menempuh suatu politik yang lebih terbuka terhadap dua Korea.

Walaupun demikian, sifat hubungan bilateral masing-masing negara anggota ASEAN dengan Korea Selatan sejak dasawarsa 1970-an telah berkembang ke arah yang lebih dekat. Hal ini sebagian disebabkan oleh usaha-usaha aktif Korea Selatan dalam berdiplomasi dengan negara-negara anggota ASEAN sebagai bagian dari strateginya untuk mendapatkan pengakuan inter-

1970-an. Misalnya, pada tahun 1970, Menteri Luar Negeri Korea Selatan melakukan kunjungan ke Malaysia dan Muangthai; dalam tahun 1972 Menteri Luar Negeri Korea Selatan berkunjung ke Malaysia, Muangthai dan Filipina; dan pada tahun 1975 mengunjungi Singapura, Filipina, Malaysia dan Indonesia.⁹

Sebagian lagi hal itu disebabkan oleh sukses Korea Selatan dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh masing-masing negara anggota ASEAN dalam pembangunan ekonomi. Sukses-sukses yang dicapai oleh kedua belah pihak dalam bidang ekonomi itu tampaknya juga mendorong mereka menjadi mitra yang makin saling diperhitungkan dalam hubungan-hubungan ekonomi, khususnya dalam bidang perdagangan dan investasi. Apakah sekedar suatu keinsidensi atau bukan, yang terjadi dalam hubungan antara Korea Selatan dan masing-masing negara anggota ASEAN adalah bahwa meningkatnya frekuensi saling kunjungan antar-pejabat tinggi terjadi pada saat Korea Selatan mulai mengalami perkembangan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dalam sejarah negeri itu.¹⁰

Dari sebab itu dapatlah disimpulkan bahwa dorongan dan agresifnya diplomasi Korea Selatan dalam bidang politik dan ekonomi lebih banyak mempunyai andil dalam mendekatkan hubungan Korea Selatan dengan masing-masing negara anggota ASEAN. Diplomasi aktif yang ditempuh oleh Korea Selatan selama periode itu tampaknya dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan: (1) mengamankan pengakuan dari dunia internasional; dan (2) lebih memperluas dan memantapkan pembangunan ekonomi negerinya. Dan sasaran-sasaran politik dan ekonomi Korea Selatan di arena internasional ini diupayakannya dengan gigih sejak semula.

Sebagai balasan atas kunjungan pejabat-pejabat tinggi Korea Selatan, pejabat-pejabat tinggi negara-negara ASEAN juga melakukan kunjungan ke Korea Selatan dalam dasawarsa 1970-an itu. Selain karena alasan formalitas diplomatik, sudah tentu kunjungan-kunjungan mereka itu juga untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya masing-masing. Karena ekonomi negara-negara ASEAN juga mengalami pertumbuhan yang cepat dalam periode tersebut, kebutuhan akan adanya mitra ekonomi yang lebih luas dan lebih banyak merupakan konsekuensi logis. Dalam kaitan ini, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang sangat pesat juga memberi peluang bagi negara-negara ASEAN. Karena itu, dalam usaha memelihara dan meningkatkan hubungan dengan Korea Selatan negara-negara ASEAN tampaknya lebih banyak memusatkan diri pada kepentingan-kepentingan ekonominya daripada kepentingan politik.

Dilihat dari segi pandangan politik ASEAN, tampaknya tidak terdapat masalah-masalah kritis yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam hubungan bilateral masing-masing negara anggota ASEAN dengan Korea Selatan. Dalam keadaan demikian sudah tentu terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan bidang kepentingan dari kedua belah pihak. Boleh jadi mereka memiliki persamaan keinginan untuk saling bekerjasama dalam memelihara perdamaian dan stabilitas serta dalam mewujudkan kemajuan-kemajuan bagi kawasan mereka masing-masing. Tetapi mereka dapat berbeda pendapat dalam hal bagaimana mencapai maksud-maksud tersebut. Misalnya, mereka semua berkepentingan dalam ditempuhnya penyelesaian secara damai atas konflik antara dua Korea, tetapi mereka masing-masing mempunyai persepsi yang saling berbeda tentang masalah itu dan karenanya berbeda pula dalam mengajukan bentuk dan cara penyelesaiannya.

Sejak kunjungan Presiden Chun Doo-hwan ke negara-negara ASEAN pada tahun 1981, hubungan-hubungan politik yang lebih akrab pada tingkat bilateral antara Korea Selatan dan masing-masing anggota ASEAN makin diperteguh. Demikian juga beberapa kepala pemerintahan dari negara-negara anggota ASEAN telah turut memperteguhnya dengan melakukan kunjungan balasan ke Korea Selatan. Masalah-masalah kritis dalam hubungan politik mereka tidak pernah muncul ke permukaan. Ini dapat terlihat dari adanya posisi bersama mereka dalam menanggapi beberapa masalah. Dalam bidang kerjasama bilateral yang mencakup hubungan-hubungan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan para pemimpin pemerintahan itu saling mengharapkan terjadinya peningkatan-peningkatan hubungan karena terus meningkatnya kepentingan mereka masing-masing dalam pembangunan dan kemajuan khususnya dalam bidang-bidang ekonomi, perdagangan dan teknik. Dalam forum-forum multilateral, misalnya, negara-negara ASEAN pada umumnya mendukung posisi Korea Selatan, seperti yang terjadi di PBB dan dalam Gerakan Non-blok. Mengenai masalah-masalah regional Asia Tenggara, seperti masalah Kampuchea dan gagasan untuk terselenggaranya suatu zona damai, bebas dan netralitas, Korea Selatan menyatakan dukungannya kepada ASEAN.¹¹

Semua ini menunjukkan bahwa hubungan negara-negara ASEAN dengan Korea Selatan akan terus berkembang ke arah yang lebih akrab dan kerjasama yang bermanfaat di masa depan. Kalau kedua belah pihak tidak melakukan perubahan-perubahan berarti dalam pandangan politik luar negrinya masing-masing pada masa-masa depan, maka tampaknya tidak akan muncul masalah-

¹¹Lihat hal ini dalam Pernyataan Bersama (*Joint Communiqué*) yang dibuat oleh Presiden Chun Doo-hwan dan masing-masing kepala pemerintahan negara-negara ASEAN -- yaitu dengan Presiden Soeharto, dengan Perdana Menteri Malaysia Datok Hussein Onn, dengan Perdana Menteri Lee Kuan Yew dari Singapura, dengan Perdana Menteri Myanmar U Nu, Timor Leste, dan

masalah politik yang kritis dalam hubungan bilateral negara-negara ASEAN dengan Korea Selatan. Dan adanya kenyataan bahwa baik di Korea Selatan maupun di masing-masing negara anggota ASEAN sistem sosial-politik non-komunis terus berlaku akan cenderung lebih membantu terselenggaranya hubungan yang makin dekat di antara mereka.

KECENDERUNGAN MASA DEPAN

Bahwa kini tidak terdapat masalah-masalah kritis dalam hubungan politik antara masing-masing negara anggota ASEAN dan Korea Selatan, dan bahwa terdapat indikasi-indikasi akan terjadinya hubungan-hubungan yang makin meningkat di bidang-bidang lainnya di antara kedua belah pihak, mungkin saja akan mendorong orang untuk mempertanyakan apakah hubungan itu kelak akan mengarah pada bentuk yang lebih terlembagakan. Atau jika diutarakan secara berbeda, masalahnya akan dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: Akankah hubungan ASEAN dengan Korea Selatan mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh ASEAN dengan para mitra dialognya (*dialogue partners*)?

Merupakan suatu fakta bahwa pada permulaannya prakarsa ASEAN untuk menyelenggarakan dialog-dialog dengan negara-negara luar, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif, terutama dilatarbelakangi oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Karena itulah maka dialog-dialog yang pertama kali dilakukan ASEAN dengan mitra luarnya adalah dengan Jepang dan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Negara-negara ASEAN makin menyadari adanya manfaat yang diperoleh dari dilakukannya penggalangan sikap bersama sebagai sarana dalam mencapai sasaran-sasaran ekonominya. Pengalaman ini kemudian juga memberikan inspirasi kepada ASEAN untuk memadukan daya dan upayanya untuk mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang berada di luar bidang ekonomi. Dengan menempuh cara-cara demikian itu bobot ASEAN dalam berhubungan dan berunding dengan pihak lain dapat lebih dirasakan. Selain dengan Jepang dan MEE, hingga kini ASEAN telah menjalin dialog-dialog secara resmi dengan Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat diajukan pertanyaan apakah Korea Selatan tidak perlu dipertimbangkan sebagai mitra dialog ASEAN dewasa ini? Tidakkah Korea Selatan kini telah menjadi salah satu mitra ekonomi dan dagang dari hampir seluruh negara anggota ASEAN yang makin perlu diperhitungkan? Tetapi tampaknya tidak terlalu mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut semata-mata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hubungan ekonomi dan politik yang telah terselenggara antara

utama ASEAN dalam menentukan diselenggarakannya hubungan formal dengan negara luar sebagai mitra dialog mungkin dapat dipergunakan sebagai petunjuk bagi prospek Korea Selatan sebagai mitra dialog ASEAN.

Pertama, semua negara atau kelompok negara yang kini menjadi mitra dialog ASEAN selain menjadi partner ekonomi penting, juga merupakan negara-negara atau kelompok negara yang memberi bantuan ekonomi kepada masing-masing negara anggota ASEAN. Amerika Serikat, Jepang, Masyarakat Ekonomi Eropa, Kanada, Australia dan Selandia Baru adalah negara-negara atau kelompok negara yang sudah cukup lama terlibat dalam pemberian bantuan bagi negara-negara ASEAN dalam membangun negerinya. Tampaknya posisi sebagai negara pemberi bantuan (donor) menjadi pertimbangan yang tidak kecil dalam perhitungan negara-negara anggota ASEAN pada umumnya dalam usaha menjadikan sesuatu pihak sebagai mitra dialognya. Hal ini tampak terlihat dari kedudukan Selandia Baru yang jika dilihat dari potensi ekonominya semata-mata tidak lebih besar daripada Korea Selatan.

Kedua, sebagian terbesar negara anggota ASEAN sudah sejak lama menjalin kontak-kontak/hubungan-hubungan dengan sebagian besar dari negara-negara atau kelompok negara yang menjadi mitra dialognya dewasa ini. Secara umum dapat disebutkan bahwa semua negara ASEAN telah menjalin hubungan-hubungan yang intensif dengan Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Eropa Barat dan Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Bahkan jauh hari sebelum ASEAN dibentuk kontak-kontak intensif dengan negara-negara ini, yang antara lain juga karena posisi mereka sebagai negara pemberi bantuan bagi masing-masing, telah terselenggara dalam berbagai tingkatan dan bentuk. Adanya kontak yang sudah cukup lama itu lebih memudahkan negara-negara ASEAN dalam "berbicara" dengan mitranya.

Dan *ketiga*, semua negara mitra dialog ASEAN adalah negara-negara yang telah mampu menjamin dan menyelenggarakan stabilitas politik dan keamanannya. Eksistensi mereka masing-masing dalam dunia internasional telah lama diterima oleh semua negara dan sah. Sebaliknya Korea Selatan masih menghadapi masalah-masalah pelik yang berkaitan dengan stabilitas politik baik di dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan dunia luar. Masalah adanya dua Korea masih belum terselesaikan secara menyeluruh dalam peraturan internasional. Sementara itu sebagian besar negara-negara anggota ASEAN, kalau tidak semuanya, akan berusaha tidak memihak dalam upaya penyelesaian soal dua Korea itu. Ini tampaknya merupakan salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam hubungan politik antara ASEAN dan Korea Selatan.

kin dikehendaki oleh Korea Selatan baik karena alasan politik maupun ekonomi, pada tahap sekarang faktor-faktor tersebut tampaknya masih perlu dipertimbangkan sungguh-sungguh. Bagi negara-negara ASEAN faktor-faktor tersebut tampaknya akan tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap usaha menjalin hubungan formal dengan Korea Selatan, khususnya jika hal itu mempunyai implikasi politik. Dari ketiga faktor itu tampaknya kendala hubungan antara dua Korea sendirilah yang merupakan perintang utama ke arah institusionalisasi hubungan politik antara ASEAN dan Korea Selatan. Karena itu untuk sementara ini biarlah hubungan politik antara negara-negara ASEAN dan Korea Selatan tetap atas dasar hubungan bilateral.

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Tetapi dalam hal ini (a) hubungan dengan Asia Tenggara yang sudah ada dan dengan Amerika Selatan harus tetap dipertahankan dan kedua-duanya harus dipertahankan sebagai faktor yang penting dalam hubungan bilateral.